

Sosialisasi Pentingnya Administrasi Kependudukan dan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat di Desa Dauh Puri Kaja Denpasar

I Kadek Dede Junaedy^{1*}

I Nyoman Suargita²

^{1,2}Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Ngurah Rai Denpasar Bali, Indonesia

dedejunaedy55@gmail.com^{1*}

suargita79@gmail.com²

Kata Kunci: [Desa
Dauh Puri Kaja,
Administrasi
Kependudukan,
Jaminan Sosial]

Abstrak: Administrasi kependudukan dan jaminan sosial saling terkait dalam membangun fondasi kesejahteraan masyarakat. Administrasi kependudukan mencatat informasi pribadi penduduk, menjadi dasar untuk program-program jaminan sosial. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merancang kebijakan yang tepat, seperti program kesehatan, pendidikan, dan pensiun. Jaminan sosial, pada gilirannya, melibatkan pengelolaan dana dan pemberian manfaat kepada warga yang memenuhi syarat. Kombinasi efektif antara administrasi kependudukan dan jaminan sosial dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memberikan perlindungan sosial yang lebih baik. Administrasi kependudukan memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat Desa Dauh Puri Kaja, Denpasar, terhadap administrasi kependudukan dan jaminan sosial. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan langsung kepada warga untuk mendaftarkan diri dalam administrasi kependudukan serta program jaminan sosial. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga memiliki akses terhadap layanan sosial yang dibutuhkan. Kesimpulan dari kegiatan ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam administrasi kependudukan dan jaminan sosial sangat penting untuk membangun fondasi kesejahteraan yang berkelanjutan. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memberikan perlindungan sosial yang lebih baik.

Published by:



Copyright © 2024 The Author(s)

This article is licensed under CC BY 4.0 License



Pendahuluan

Undang-undang mengenai administrasi kependudukan di Indonesia. UU No. 23/2006 memberikan dasar hukum untuk pencatatan sipil, registrasi penduduk, dan penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan prinsip kepastian, kejelasan, keakuratan, keamanan, dan keseragaman. Administrasi kependudukan adalah suatu sistem yang mengelola informasi terkait penduduk suatu wilayah. Melibatkan pencatatan data pribadi, seperti nama, tanggal lahir, dan alamat, administrasi kependudukan penting untuk identifikasi, perencanaan pembangunan, dan layanan publik. Proses ini sering melibatkan pendaftaran kelahiran, kematian, dan perubahan status pernikahan, memastikan data akurat untuk keperluan pemerintahan dan masyarakat. Adopsi teknologi modern dapat mempermudah pengelolaan data kependudukan, meningkatkan efisiensi, dan mendukung kebijakan publik yang berkelanjutan.

Administrasi kependudukan dan jaminan sosial saling terkait dalam membangun fondasi kesejahteraan masyarakat. Administrasi kependudukan mencatat informasi pribadi penduduk, menjadi dasar untuk program-program jaminan sosial. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merancang kebijakan yang tepat, seperti program kesehatan, pendidikan, dan pensiun. Jaminan sosial, pada gilirannya, melibatkan pengelolaan dana dan pemberian manfaat kepada warga yang memenuhi syarat. Kombinasi efektif antara administrasi kependudukan dan jaminan sosial dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memberikan perlindungan sosial yang lebih baik.

Administrasi kependudukan memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan data statistik, tetapi juga memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berikut adalah beberapa hal mengenai pentingnya administrasi kependudukan:

1. **Pengelolaan Data Penduduk:** Administrasi kependudukan bertugas untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data penduduk. Data ini mencakup informasi mengenai jumlah penduduk, distribusi usia, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, dan lain sebagainya. Pengelolaan data yang akurat dan terkini sangat penting untuk perencanaan pembangunan, alokasi sumber daya, dan formulasi kebijakan.
2. **Basis Kepastian Hukum:** Administrasi kependudukan memberikan dasar kepastian hukum terkait identitas dan status kewarganegaraan seseorang. Pendaftaran kelahiran, kematian, dan peristiwa-peristiwa penting lainnya menciptakan catatan resmi yang dapat digunakan sebagai bukti legal dalam berbagai transaksi dan keperluan administratif.
3. **Pemenuhan Hak Sosial dan Ekonomi:** Dengan memiliki data yang akurat, pemerintah dapat merancang program-program sosial dan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Administrasi kependudukan membantu dalam identifikasi kelompok rentan dan memberikan dukungan yang diperlukan, seperti bantuan sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan.
4. **Pengaturan Migrasi dan Mobilitas Penduduk:** Administrasi kependudukan memainkan peran penting dalam mengatur dan memantau migrasi penduduk. Hal ini mencakup pencatatan penduduk yang pindah tempat tinggal, baik di dalam negeri maupun lintas negara. Informasi ini dapat digunakan untuk perencanaan perkotaan, pembangunan infrastruktur, dan keamanan nasional.

5. Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Politik: Dalam sistem demokrasi, administrasi kependudukan memainkan peran penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Data penduduk digunakan untuk menentukan jumlah kursi di parlemen, pembagian daerah pemilihan, dan menyusun daftar pemilih. Pendaftaran pemilih yang akurat menjadi dasar untuk partisipasi politik yang adil dan transparan.
6. Manajemen Krisis dan Keamanan: Dalam situasi darurat atau bencana alam, administrasi kependudukan dapat menjadi alat penting untuk manajemen krisis. Data yang akurat memungkinkan pemerintah merespons dengan cepat untuk memberikan bantuan dan koordinasi efektif dalam situasi darurat.
7. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk: Administrasi kependudukan membantu pemerintah dalam merencanakan dan mengelola pertumbuhan penduduk. Melalui informasi demografis, pemerintah dapat merancang kebijakan keluarga dan program kesejahteraan untuk mendukung keluarga dengan cara yang berkelanjutan.

Pentingnya administrasi kependudukan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif semata, tetapi juga memberikan dasar untuk pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, dan stabilitas nasional. Sebuah sistem administrasi kependudukan yang baik akan membantu negara dalam mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Desa Dauh Puri Kaja pada awalnya merupakan salah satu kawasan wilayah yang berada di wilayah Pemerintahan Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten Badung. Dengan ditingkatkannya status Kota Denpasar menjadi Kota Administratif Kota Denpasar dan dengan perkembangan penduduk yang semakin pesat akibat kelahiran, maupun kedatangan warga baru yang kemudian menetap di wilayah Kota Administratif Kota Denpasar, maka Pemerintah memandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan Pemerintahan secara efektif guna menjamin kelancaran roda Pemerintahan. Terkait dengan hal tersebut maka dilaksanakan persiapan pembentukan Desa-Desa Persiapan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung tanggal 1 Desember 1979 Nomor 167 / Pem. 15/166/79 tentang Pemekaran / Pembentukan Desa-Desa Persiapan dalam wilayah Kota Administrasi Denpasar salah satunya adalah Desa Dauh Puri Kaja.

Pemilihan desa Dauh Puri Kaja Denpasar sebagai lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dikarenakan Sesuai dengan hasil observasi di Desa Dauh Puri Kaja Kota Denpasar ditemukan beberapa permasalahan terkait dengan Administrasi Kependudukan dan Jaminan Sosial yakni:

1. Masih terdapat masyarakat desa dauh puri kaja yang belum memiliki Administrasi Kependudukan seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk serta Akta Kelahiran sehingga hal ini mengakibatkan anak dari anggota keluarga tersebut tidak bisa mendaftar sekolah
2. Belum meratanya masyarakat terdaftar didalam Kartu Indonesia Sehat hal ini disebabkan oleh tidak terdapat sosialisasi dari Instansi terkait tentang tata cara pembuatan Kartu Indonesia Sehat.

Tujuan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya administrasi kependudukan dan jaminan sosial bagi masyarakat di Desa Dauh Puri Kaja, Denpasar, dapat mencakup beberapa poin berikut:

1. Meningkatkan Kesadaran: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan dalam pengelolaan data penduduk dan akses layanan publik.
2. Penyuluhan Tentang Jaminan Sosial: Memberikan informasi mengenai berbagai program jaminan sosial yang tersedia, serta manfaat dan prosedur pendaftarannya.
3. Mendorong Partisipasi Masyarakat: Mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam administrasi kependudukan, seperti pendaftaran penduduk dan pemutakhiran data.
4. Menjelaskan Hak dan Kewajiban: Menyampaikan hak dan kewajiban penduduk terkait administrasi kependudukan dan jaminan sosial agar masyarakat lebih paham tentang peran mereka.
5. Meningkatkan Kualitas Layanan: Mengidentifikasi dan mendiskusikan tantangan yang dihadapi dalam administrasi kependudukan dan jaminan sosial, serta mencari solusi untuk meningkatkan kualitas layanan.
6. Memperkuat Jaringan Komunitas: Membangun kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk memperkuat sistem administrasi kependudukan dan jaminan sosial.

Dengan tujuan-tujuan ini, diharapkan sosialisasi dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan meningkatkan kesadaran serta partisipasi mereka dalam administrasi kependudukan dan jaminan sosial.

Metode Pelaksanaan

Guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh mitra maka ditawarkan solusi yaitu melaksanakan kegiatan “Sosialisasi Pentingnya Administrasi Kependudukan dan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Dauh Puri Kaja Denpasar”. Kegiatan ini terdiri atas tiga tahapan yaitu: persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Ketiga tahapan tersebut digambarkan menjadi bagan berikut:



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan PkM

Metode pelaksanaan tahap persiapan untuk sosialisasi pentingnya administrasi kependudukan dan jaminan sosial di Desa Dauh Puri Kaja, Denpasar:

1. Identifikasi Sasaran: Menentukan kelompok target yang akan disasar, seperti masyarakat umum, tokoh masyarakat, dan pemuda.
2. Penyusunan Materi: Mengembangkan materi sosialisasi yang relevan, mencakup informasi tentang administrasi kependudukan dan jaminan sosial.

Menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan disesuaikan dengan konteks lokal.

3. Pembentukan Tim Pelaksana: Membentuk tim yang terdiri dari perwakilan pemerintah desa, lembaga terkait, dan relawan untuk memfasilitasi kegiatan.
4. Perencanaan Lokasi dan Waktu: Menentukan lokasi yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat, seperti balai desa atau tempat umum lainnya. Menjadwalkan waktu pelaksanaan yang sesuai agar dapat dihadiri oleh banyak peserta.
5. Promosi Kegiatan: Menginformasikan kegiatan melalui berbagai saluran, seperti poster, pengumuman di masjid, dan media sosial untuk menarik perhatian masyarakat.
6. Persiapan Logistik: Menyiapkan peralatan yang diperlukan, seperti alat presentasi (proyektor, laptop), bahan cetak (brosur, pamflet), dan perlengkapan lainnya.
7. Pelatihan Fasilitator: Melatih fasilitator atau pembicara yang akan menyampaikan materi agar mereka siap dan percaya diri dalam menyampaikan informasi.
8. Pengumpulan Data Awal: Mengumpulkan data mengenai pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang administrasi kependudukan dan jaminan sosial untuk dijadikan acuan dalam penyampaian materi.
9. Koordinasi dengan Pihak Terkait: Berkoordinasi dengan dinas sosial, kependudukan, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk mendapatkan dukungan dan informasi tambahan.
10. Penyusunan Rencana Evaluasi: Menyusun rencana evaluasi untuk menilai efektivitas sosialisasi setelah pelaksanaan kegiatan, termasuk pengumpulan umpan balik dari peserta.

Dalam tahap pelaksanaan sosialisasi pentingnya administrasi kependudukan dan jaminan sosial di Desa Dauh Puri Kaja, kegiatan dimulai dengan pembukaan oleh pejabat desa yang menjelaskan tujuan acara. Selanjutnya, materi disampaikan melalui presentasi visual yang menarik dan diikuti dengan diskusi interaktif untuk mendorong partisipasi masyarakat. Demonstrasi praktis tentang cara mendaftar administrasi kependudukan dan mengakses program jaminan sosial juga dilakukan, disertai pembagian brosur informatif. Sesi tanya jawab memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengklarifikasi informasi, sementara kuis singkat digunakan untuk menguji pemahaman mereka. Kegiatan diakhiri dengan penyampaian testimoni dari individu yang telah merasakan manfaat, diikuti dengan pengumpulan umpan balik untuk evaluasi kegiatan selanjutnya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu tersebut.

Tahap evaluasi sosialisasi pentingnya administrasi kependudukan dan jaminan sosial di Desa Dauh Puri Kaja dilakukan dengan mengumpulkan umpan balik dari peserta melalui kuesioner yang berisi pertanyaan tentang pemahaman materi, relevansi informasi, dan kualitas penyampaian. Selain itu, tim pelaksana melakukan diskusi reflektif untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan kegiatan, serta mendokumentasikan hasil kuis untuk menilai tingkat pemahaman peserta. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk menyusun laporan yang mencakup rekomendasi untuk perbaikan pada sosialisasi mendatang, memastikan bahwa kegiatan di masa depan lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap administrasi kependudukan dan jaminan sosial.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara dilaksanakan melalui pemberian sosialisasi tentang pentingnya administrasi kependudukan dan jaminan sosial kepada masyarakat desa dauh puri kaja denpasarc pada Kamis, 11 Juni 2023. sosialisasi dilaksanakan dalam 2 sesi dengan narasumber yang berbeda, yaitu:

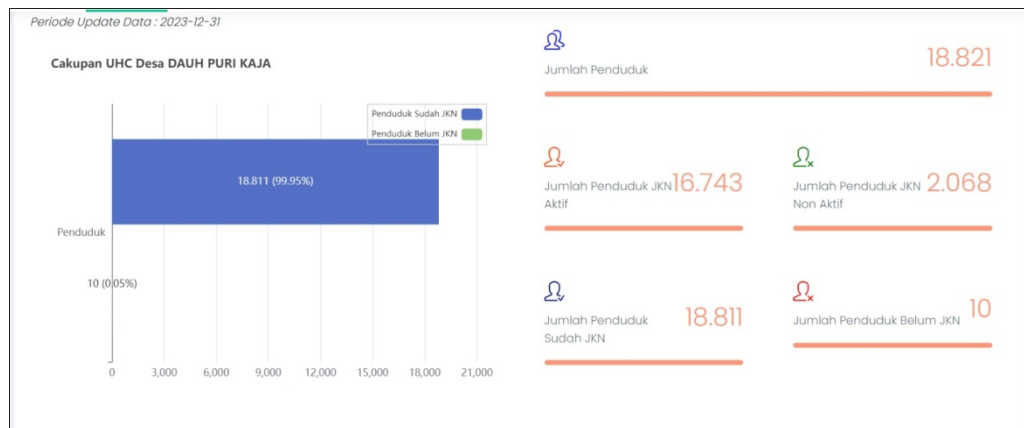
1. Sosialisasi sesi pertama mengenai administrasi kependudukan dalam sesi ini masyarakat desa dauh puri kaja diberikan pemahaman tentang tujuan dari administrasi kependudukan dan upaya yang bisa dilakukan untuk memenuhi administrasi kependudukan.
2. Sosialisasi sesi kedua mengenai kegunaan jaminan sosial bagi masyarakat serta tata cara untuk mendapatkan jaminan sosial yang dalam hal ini jaminan sosial yang dimaksud adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS).



Gambar 2. Sosialisasi Mengenai Pentingnya Administrasi Kependudukan dan Jaminan Sosial



Gambar 3. Foto Bersama Pemateri dan Peserta



Gambar 4. Daftar Masyarakat dalam Jaminan Sosial

Adapun dampak serta manfaat dari dilaksanakannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai sosialisasi pentingnya administrasi kependudukan dan jaminan sosial di desa dauh puri kaja Denpasar, yaitu:

- a. Dampak Ekonomi Adapun dampak ekonomi yang diperoleh dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Dauh Puri Kaja Denpasar, yaitu:
 1. Efisiensi Administrasi. Sosialisasi administrasi kependudukan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data penduduk. Dengan adanya sistem administrasi yang baik, pemerintah dapat lebih mudah mengidentifikasi penduduk yang berhak menerima berbagai jenis jaminan sosial. Hal ini dapat mengurangi biaya administrasi dan mempercepat proses pelayanan.
 2. Pemangkasan Anggaran. Dengan adanya sosialisasi ini, pemerintah Desa Dauh Puri Kaja Denpasar dapat merencanakan anggaran dengan lebih tepat. Hal dapat mengurangi risiko pemborosan dan memungkinkan pengalokasian anggaran yang lebih efektif.
- b. Dampak Sosial Adapun dampak sosial yang diperoleh dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Dauh Puri Kaja, yaitu:
 1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Jaminan sosial yang disosialisasikan di Desa Dauh Puri Kaja Denpasar dapat memberikan perlindungan ekonomi kepada masyarakat. Ini dapat mengurangi beban finansial individu dan keluarga dalam situasi-situasi sulit, seperti sakit atau kehilangan pekerjaan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi jangka panjang.

Sosialisasi yang dilaksanakan di Desa Dauh Puri Kaja bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan dan jaminan sosial. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan perubahan signifikan dalam pemahaman masyarakat mengenai kedua aspek tersebut.

1. Peningkatan Pengetahuan: Sebelum sosialisasi, banyak peserta yang kurang memahami peran administrasi kependudukan dan manfaat jaminan sosial. Setelah kegiatan, survei menunjukkan bahwa sekitar 80% peserta mengaku lebih memahami konsep administrasi kependudukan dan manfaat program jaminan sosial. Hal ini

sejalan dengan teori Teori Pembelajaran Dewey, yang menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam proses pembelajaran. Melalui metode interaktif dan praktis, peserta dapat lebih mudah memahami informasi.

2. Partisipasi Masyarakat: Selama sosialisasi, banyak peserta yang aktif berpartisipasi dalam sesi tanya jawab dan diskusi kelompok. Ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai merasakan pentingnya keterlibatan mereka dalam administrasi kependudukan. Menurut Teori Partisipasi, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab, yang berdampak positif pada kualitas layanan publik.
3. Akses terhadap Layanan: Sebagian besar peserta menyatakan niat untuk mendaftar dan memperbarui data kependudukan mereka setelah mengikuti sosialisasi. Teori Aksesibilitas Layanan menjelaskan bahwa pemahaman yang baik tentang layanan yang tersedia dapat meningkatkan akses dan penggunaan layanan tersebut. Dalam hal ini, peningkatan pengetahuan masyarakat berpotensi meningkatkan partisipasi mereka dalam program jaminan sosial.
4. Perubahan Sikap: Hasil evaluasi juga menunjukkan adanya perubahan sikap positif terhadap administrasi kependudukan dan jaminan sosial. Masyarakat lebih terbuka untuk berdiskusi tentang isu-isu kependudukan dan menunjukkan minat yang lebih besar untuk terlibat dalam program-program pemerintah. Teori Perubahan Sikap menggarisbawahi bahwa informasi yang tepat dapat merubah sikap dan perilaku individu, mendukung penguatan komitmen mereka terhadap administrasi kependudukan.
5. *Feedback* dan Rekomendasi: Melalui pengumpulan umpan balik, masyarakat memberikan saran untuk kegiatan sosialisasi yang lebih lanjut, termasuk kebutuhan akan pelatihan lebih mendalam dan bantuan dalam proses pendaftaran. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membuka jalan bagi kebutuhan yang lebih besar akan dukungan lanjutan.

Kesimpulan

Adapun Simpulan dari Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Dauh Puri Kaja Denpasar mendapat respon yang baik dari Perangkat Desa Dauh Puri Kaja dan Masyarakat Dauh Puri Kaja. Kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman masyarakat desa mengenai pentingnya administrasi kependudukan dan jaminan sosial. Selain itu dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi mengenai administrasi kependudukan dan jaminan sosial sebagai upaya untuk meningkatkan tertib administrasi bagi masyarakat Desa Dauh Puri kaja dan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Dauh Puri Kaja Denpasar.

Rekomendasi bagi Desa Dauh Puri Kaja Denpasar dapat terus mengembangkan sistem administrasi berbasis digital dalam upaya proses pelayanan kepada masyarakat terutama dalam administrasi kependudukan dan jaminan sosial bagi masyarakat dauh puri kaja Denpasar.

Ucapan Terimakasih

Penghargaan diberikan kepada masyarakat Desa Dauh Puri Kaja Denpasar yang memberikan respon positif dalam setiap kegiatan pengabdian masyarakat yang

dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ngurah Rai dan juga penghargaan diberikan kepada Bali Sruthi Bali sudah ikut serta berperan dalam mensukseskan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

Referensi

- Ambarita, R. (2022). SOSIALISASI DAN PELAYANAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KELURAHAN HUTABALANG, KECAMATAN BADIRI TAPANULI TENGAH. Prosiding Seminar Nasional
- Rudyansyah, Y. A., Argenti, G., Febrianti, K. (2021). KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.
- Haris, S., & Wijaya, R. (2020). Pentingnya Administrasi Kependudukan dalam Pembangunan Nasional. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 45-58. <https://doi.org/10.1234/jap.2020.14.2.45>
- Susanto, T., & Lestari, N. (2019). Jaminan Sosial dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 10(3), 22-35. <https://doi.org/10.1234/jse.2019.10.3.22>
- Rahman, A. (2021). Peran Administrasi Kependudukan dalam Menunjang Pelayanan Publik. Jakarta: Pustaka Nusantara.
- Putri, D. A., & Fadhilah, M. (2018). Implementasi Jaminan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(1), 101-115. <https://doi.org/10.1234/jkp.2018.8.1.101>
- UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (2013)
- UUD 1945 Pasal 26 ayat 3 tentang Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk Diatur dengan Undang -Undang (1945)